



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
DEWAN PENGURUS WILAYAH BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID  
INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEBENCANAAN  
NOMOR : 360 / 985 / BPBD / VIII / 2022  
NOMOR : 031 -A / BKPRMI - SU / VIII / 2022

Pada hari ini, Kamis....., tanggal Empat..... bulan Agustus. tahun dua ribu dua puluh dua (4-8-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS LUBIS : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/1133/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10,3 Nomor 8 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SYAFRIZAL HARAHAHAP : Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Nomor 622-

A/SK/BKPRMI/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengesahan Kepengurusan Paripurna Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2022 – 2026, berkedudukan di Jalan Garuda Komplek Ashohiby Nomor 1B Tegal Sari Mandala II Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
11. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/12672/2021 dan Nomor 182-A/BKPRMI-SU/2021 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama penggunaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kebencanaan dengan menjadi relawan di Bidang Kebencanaan.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Dukungan dalam upaya penanganan bencana.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini beserta lampiran syarat dan ketentuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dan bersama-sama mensosialisasikan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara dari PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan Pelatihan, Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. memberikan informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan mangang dan praktek kerja lapang; dan

c. menyediakan dan memberikan akomodasi dan konsumsi kepada PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU;
- b. memperoleh sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan magang dan praktek kerja lapang; dan
- c. memperoleh akomodasi dan konsumsi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan dukungan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KESATU dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara;
- b. melaksanakan penyuluhan dan transfer pengetahuan keterampilan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan Perundang-Undangan.

## PASAL 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

## PASAL 9

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai, atau

2. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 10  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit (2) dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

PASAL 11  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang sepanjang bersifat teknis akan dituangkan dalam Adendum (penambahan atau pengurangan materi) Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.